

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti mengenai implementasi kebijakan *e-goverment* dalam peningkatan pelayanan publik di Desa Lanaus dapat di tarik simpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi, implementasi kebijakan *e-goverment* dalam peningkatan pelayanan publik di Desa Lanaus yaitu pemerintah Daerah telah memberikan perintah dan aturan kepada setiap pemerinta desa agar menerapkan *e-goverment* dengan tujuan agar pelayanan publik itu berjalan dengan efektif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa pemerintah daerah belum melakukan sosialisasi terkait *e-goverment* sehingga pemerintah Desa belum menerapkan *e-goverment* di desa.
2. Sumberdaya, implementasi kebijakan *e-goverment* dalam peningkatan pelayanan publik di Desa Lanaus yaitu para aparat desa pernah mengikuti BIMTEK. Namun dalam pelaksanaanya Pemerintah Desa Lanaus tidak memiliki sumberdaya manusia yang menguasai teknologi informasi sehingga belum adanya penerapan *e-goverment* di Desa Lanaus.
3. Disposisi, implementasi kebijakan *e-goverment* dalam pelayanan publik pemerintah daerah sangat mendukung penuh adanya implementasi kebijakan *e-goverment* di Desa karena dengan adanya kebijakan *e-goverment* maka informasi terkait pelayanan publik dapat diakses secara online. akan tetapi masih terdapat

kendala dimana belum ada staf yang menguasai teknologi informasi dan juga masyarakat yang kurang memahami bagaimana cara menggunakan media elektronik oleh karena itu jika pemerintah desa akan menerapkan *e-goverment* maka pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang implementasi kebijakan *e-goverment*.

4. Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan *e-goverment* dalam pelayanan publik yaitu pemerintah daerah sangat mendukung penuh adanya implementasi kebijakan *e-goverment* di desa. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan serta pengelolaan kegiatan mulai dari pembuatan kebijakan sampai pada para pelaksana di lapangan. implementasi kebijakan *e-goverment* dalam pelayanan publik yaitu pemerintah daerah sangat mendukung penuh adanya implementasi kebijakan *e-goverment* di desa

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran terkait dengan implementasi kebijakan *e-goverment* dalam peningkatan pelayanan publik di Desa Lanaus sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa perlu menerapkan kebijakan *e-goverment* di desa lanaus agar pelayanan publik berjalan dengan efektif.
2. Pemerintah Desa perlu memberikan pelatihan atau kursus kepada aparat desa terkait teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdal 2015. *Kebijakan publik (memahami konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: Pusat penelitian dan penerbitan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN sunan gunung jati bandung.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan publik; teori dan proses*, jakarta: PT buku kita.
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gerston, L.N. 1992. *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engaagement*. New York: M.E Sharp, inc.
- Grindle, Marille S. 1980. *Politic and policy implementation in the third world*. Inggris: Pricentor University Press.
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen publik* . Jakarta: PT. Gramedia widia saran.
- Islami, irfan, 1992 *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*, jakarta: Bumi aksara.
- Junaidi. 2011. Dukungan *e-goverment* dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di era otonomi daerah: Kasus Best Practices dari sejumlah daerah di Indonesia. *Proceding simposium nasional otonomi daerah. LAB-AEN FISIP* Untirta. Indonesia.
- Indrajit, Richardus Eko 2005. *E-goverment in action*. Yogyakarta: Andi offset.
- J.P. Gant 2008. *Electronic Goverment for developing countries*. Jenewa: ITU
- Komariah, Djam'an Satori 2011. *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Mariano, S. 2018. *Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Airlangga.Nasrullah, R. 2017. *Media Sosial (4th ed.)*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Muallidin, Isnaini 2015. *Konsep, kerangka pikir dan nilai e-goverment dan e-service*. Yogyakarta.
- Moleong, LJ 2002. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2009). *Publik policy, Edisi Kedua*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Nurhadryani 2009. *Memahami konsep e-governance serta seminar nasional informatika*. (SEMNAS IF 2009) ISSN: 1979-2328.UPN "Veterasi" Yogyakarta.
- Poerwadarminta,1952,*Kamus umum Bahasa Indonesia oleh Pusat pembinaan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rohidi Mulyarto,1992,*Analisis data kualitatif:buku sumber tentang metode-metode baru*, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

- Rahmadana, dkk 2020. *Pelayanan publik (Janner Simarmata, Ed)*. Yayasan kita menulis.
- Sugiyono. 2005. *metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suaedi, Falih dan wardianto, bintoro (eds) 2010. *Revitalisasi administrasi negara (revormasi birokrasi) dan e-governance*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Wibawa, samodra 2009. *Administrasi negara: isu-isu kontemporer*, yogyakarta: Graha ilmu.

Jurnal :

- Ahmad Juliarso 2019. Analisis implementasi *e-goverment* dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/1417>
- Angga Riyadipura 2015. Implementasi kebijakan e-goverment dalam peningkatan pelayanan publik di Kota Tangerang.
<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/humas/article/download/358/pdf>
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika pelayanan publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76.
- Furqon, M., Hermansyah, D., Sari, S., Sukma, A., Akbar, Y., & Rakhmawati, N. A. (2018). Analisis Sosial Media Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Respons Warganet. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(2), 2–4.
- Hasan, M., & Suprihatin, S. (n.d.). Motif Pengguna Facebook Mengunggah Keluhan Tentang Pelayanan Publik. Pawitra Komunika: *Jurnal Komunikasi Dan Sosial Humaniora*, 1, 22–32.
- Maryam, N.S 2016. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal ilmu politik dan komunikasi*, V (1), 12-27.
- Mustafid, dan sugiharto, A. 2014. Analisis implementasi e-goverment untuk pelayanan publik dikota semarang. *Riptek vol.8, No. 2*, 35-50.
- Muchtar. 2019. *Akuntabilitas Politik Anggaran Dana Desa di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang* (Studi Kasus Belanja Pembangunan Desa).
- Muh Asri 2023. Penerapan *e-goverment* dalam pelayanan publik di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/35557-Full_Text.pdf
- Riani, N. K. (2021). *Strategi Peningkatan Pelayanan Publik*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443–2452.
- Rubiyanto, R. (2018). Implementasi kebijakan e-goverment pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten nganjuk. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1).

Yuliani, et. al (2020). *Media Baru Dalam Pelayanan Publik. Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 4(2), 149–157.

Peraturan Perundang-undangan :

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. (2018). *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemeterian Komunikasi dan Informatika. indonesiabaik.id/ebook/memaksimalkan-penggunaan-media-sosial-dalamlembaga-pemerintah*

Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.